

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini, peneliti akan menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah Pendapatan asli Daerah Sektor Pariwisata. Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu pendapatan asli daerah, jumlah obyek wisata, jumlah kunjungan wisatawan, lama menginap wisatawan, tingkat hunian kamar hotel, produk domestik regional bruto, dan tingkat inflasi.

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah serta antar Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang merupakan prasyarat sistem pemerintah daerah. Salah satu sumber keuangan tersebut adalah pendapatan asli daerah.

Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah, baik yang bersumber dari luar daerah (negeri) maupun

yang bersumber dari dalam daerah (negeri). Salah satu sumber dari dalam negeri adalah pendapatan asli daerah. Suatu daerah dikatakan berhasil dan mandiri, apabila mampu meningkatkan pendapatan daerah terutama PAD.

Pendapatan asli daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah sesuatu yang dapat diukur dengan uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah.

Abdul Halim memberikan definisi pendapatan asli daerah PAD sebagai, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mardiasmo mendefinisikan pendapatan asli daerah sebagai, penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian PAD adalah sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan hasil kekayaan yang dipisahkan yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan mendukung pembangunan yang

akan dilaksanakan pada masa yang akan datang serta memelihara pembangunan yang telah dilaksanakan.

Sebelum dikeluarkannya UU otonomi daerah tahun 1999, sumber keuangan daerah, baik Provinsi, Kabupaten, maupun Kotamadya menurut UU No.5 Tahun 1974 adalah:

- a. Penerimaan Asli Daerah
- b. Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak
- c. Bantuan Pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan tingkat II
- d. Pinjaman Daerah
- e. Sisa lebih anggaran tahun lalu
- f. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

2.1.1.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa PAD bersumber dari:

A. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah demi kemakmuran rakyat. Jenis-jenis pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sebagai berikut: pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak

hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

B. Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah letak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan retribusi ada timbal balik langsung dari penerima retribusi kepada penerima retribusi.

Menurut objeknya, retribusi digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum, merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan.
2. Retribusi jasa usaha, merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta dan atau penyewa aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, misalnya: retribusi pasar grosir, terminal, rumah potong hewan, dan lain-lain.
3. Retribusi perizinan tertentu, kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka memberikan ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Perijinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi (Pasal 18 ayat (2) UU No. 34 Tahun 2000).

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran belanja daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung jawabkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut bersumber dari:

1. Bagian laba dari perusahaan daerah
2. Bagian laba dari lembaga keuangan bank (sebagai contoh : Bank Daerah)
3. Bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya

D. Lain-lain PAD Yang Dipisah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Bab V Pasal 6 ayat 2 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu sebagai berikut :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa giro
3. Pendapatan bunga

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

2.1.1.3 Sumber Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata bersumber dari:

A. Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 08 Tahun 2010, Pajak Hotel adalah pengenaan (pemungutan) pajak terhadap setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang meliputi fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

Adapun yang tidak termasuk objek pajak hotel adalah sebagai berikut:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
3. Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan

5. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

B. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 3.000.000 perbulan.

C. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Jika objek pajak tersebut adalah jasa penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran, maka subjek pajaknya adalah penikmat hiburan baik itu orang pribadi atau badan yang membayar untuk sebuah hiburan. Sementara yang bertindak sebagai wajib pajaknya adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

D. Retribusi Pariwisata

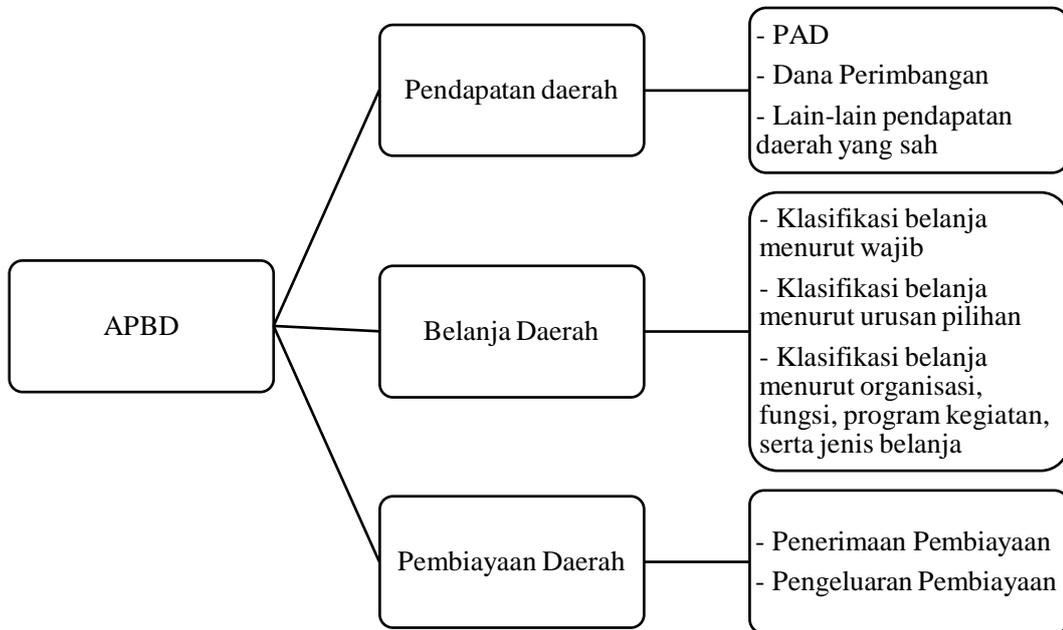
Retribusi pariwisata merupakan pungutan yang dikenakan pada pengunjung yang datang ke tempat destinasi. Retribusi ini masuk kedalam jenis retribusi jasa usaha. Tujuan utama dari peningkatan retribusi pariwisata

1. Untuk meningkatkan pelayanan fasilitas, tempat rekreasi.
2. Untuk meningkatkan ketertiban pengunjung serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2.1.1.4 Pendapatan Asli Daerah Sebagai Bagian Dari APBD

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Struktur APBD



Struktur APBD tersebut diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah meliputi:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah

tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. PAD terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

b. Dana Perimbangan

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun dana perimbangan terdiri dari; Bagi Hasil Pajak, Dana Lokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan dari Provinsi (khusus Kabupaten/Kota).

c. Pendapatan lain-lain yang sah

Pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah, selain itu juga jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan seperti; hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah dan penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban

daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja.

a. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil. pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, pemerintahan umum, kepegawaian, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika.

b. Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan

Pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian; dan transmigrasi.

c. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan, organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja

Belanja daerah tersebut mencakup:

- 1) Belanja Tidak Langsung, meliputi: belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tak terduga.
 - 2) Belanja langsung, meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.
3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

a. Penerimaan Pembiayaan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 60 menyebutkan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah, meliputi: sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah, meliputi: pembentukan dan cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman daerah.

2.1.2 Pariwisata

2.1.2.1 Pengertian Pariwisata

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta, sesungguhnya bukanlah berarti "*tourisme*" (bahasa belanda) atau "*tourism*" (bahasa inggris). Kata pariwisata menurut pengertian ini, sinonim dengan pengertian "tour". Pendapat ini berdasarkan pemikiran bahwa kata pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu "pari" dan "wisata". Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Wisata berarti perjalanan, berpergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata travel. Maka dari itu pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain (Yoeti, 1996).

Pada saat ini, kedudukan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan yang dapat meningkatkan devisa negara sebagai pendukung komoditi ekspor migas maupun non migas. Pengembangan sektor pariwisata dilakukan karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan devisa negara dan disamping itu kegiatan pariwisata merupakan hal yang terkait erat dengan sumber daya yang unik dari suatu tujuan wisata, yaitu dalam bentuk daya tarik alam dan daya tarik budaya. Secara harfiah pengertian pariwisata diartikan sebagai aktivitas

menikmati perjalanan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu melepaskan kejenuhan dan kepenatan dari kehidupan sehari-hari.

Pengertian pariwisata menurut pendapat beberapa ahli, yaitu :

1. Spillane (1982) menyatakan bahwa pariwisata merupakan kegiatan melakukan perjalanan untuk mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan tujuan lainnya.
2. McIntosh dan Goeldner (1990) mendefinisikan pariwisata sebagai sejumlah fenomena dan hubungan yang timbul dan interaksi wisata, pemasok bisnis, pemerintah, tuan rumah, dan komunitas tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan dan pengunjung lainnya.
3. Yoeti (2008) menyatakan pariwisata yaitu perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari suatu tempat ke tempat lain, selain itu pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha (*business*), atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Dari pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan pengertian pariwisata adalah kegiatan atau perjalanan terencana yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan dengan berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk sementara waktu dengan tujuan bukan untuk mencari nafkah akan tetapi untuk menikmati keindahan, melepaskan kepenatan, kejenuhan yang dialami

sehari-hari, menghabiskan waktu luar, mendapatkan kepuasan serta menyenangkan diri.

2.1.2.2 Ekonomi Pariwisata

Sektor pariwisata memberikan kontribusi dalam meningkatkan devisa atau pemasukan perekonomian untuk peningkatan pembangunan, daerah wisata, pemerintah daerah maupun negara. Spillane (1994), menyatakan bahwa dampak positif pariwisata terhadap pembangunan ekonomi antara lain adalah dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, sumber devisa negara dan distribusi pembangunan secara spritual. Sedangkan dampak negatif pariwisata terhadap pembangunan ekonomi antara lain adalah *vulnerability* ekonomi, kebocoran pendapatan, polarisasi spasial, sifat pekerjaan yang musiman, dan terhadap alokasi sumber daya ekonomi.

Sektor pariwisata dapat berperan sebagai motor penggerak pemabangunan perekonomian sekaligus berperan penting dalam pengembangan aneka kebudayaan, pelestarian lingkungan dan pemeliharaan hubungan sosial, perlindungan warisan budaya serta penguatan perdamaian dunia. Hal ini didukung pernyataan, sutiksno, dkk (2020) bahwa sektor pariwisata mempunyai korelasi yang positif bagi sumber devisa (pendapatan) bagi suatu negara dan juga bagi pendapatan masyarakat sekitar di lokasi wisata.

Beberapa unsur penting yang terdapat dalam sistem pariwisata diantaranya permintaan dan penawaran pariwisata. Pemahaman tentang permintaan dan penawaran ini sangat penting sebagai dasar perencanaan yang menyeluruh untuk

membangun ekonomi pariwisata, karena pengabaian salah satu unsur saja dari perencanaan pariwisata maka akan berpotensi untuk mengurangi efektivitas rencana yang dihasilkan.

2.1.2.3 Permintaan Pariwisata

Menurut ilmu ekonomi, permintaan merupakan sejumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh pelanggan dan mampu untuk membeli dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Kemudian terdapat hubungan yang tetap antara harga pasar dengan jumlah permintaan. Mcintosh, Goeldner dan Ritchie (1995); Wahab (1996), menyatakan bahwa permintaan erat kaitannya dengan harga-harga pasar dan merupakan faktor yang menentukan, namun pariwisata memiliki hubungan internasional pada pemerintah. Banyak faktor yang turut memengaruhi wisatawan untuk melakukan perjalanan ke suatu daerah tujuan wisata tertentu. Permintaan pariwisata pada dasarnya merupakan orang-orang yang ingin melakukan perjalanan wisata.

Permintaan pariwisata menurut Mathieson dan Wall (1982) terdiri atas tiga jenis yaitu :

1. Permintaan efektif atau permintaan aktual wisatawan sedang menikmati fasilitas pariwisata misalnya orang-orang yang sedang melakukan perjalanan.
2. Permintaan tertahan (*suppressed demand*) merupakan seluruh atau sebagian masyarakat yang tidak melakukan perjalanan karena alasan tertentu. Dua alasan yang membentuk permintaan tertahan yaitu : (i) permintaan potensial, mereka yang ingin berpergian tetapi tidak dilakukan karena belum mempunyai

daya beli saat itu. Jika seandainya nanti memperoleh kenaikan pendapatan maka permintaan potensial ini akan berubah menjadi permintaan efektif ; (ii) permintaan tertunda, dimana golongan ini membayar, tetapi karena alasan tertentu menunda perjalanan. Jika alasan menunda tidak ada, maka permintaan tertunda ini akan menjadi permintaan efektif.

3. Tidak ada permintaan. Mereka yang termasuk kategori ini adalah mereka yang tidak ada dan tidak mau mengadakan perjalanan (*no demand*) berdasarkan pemikiran tersebut, maka pengembangan pariwisata diharapkan menjadikan orang yang semula hanya ingin berwisata menjadi secara nyata melakukan perjalanan wisata sedangkan orang yang sedang/sudah melakukan perjalanan wisata juga diharapkan untuk mengadakan perjalanan lagi pada kesempatan yang akan datang.

Proses pengambilan keputusan untuk berwisata sebenarnya sangat kompleks karena banyak hal yang harus di pertimbangkan. Faktor kepribadian, daya tarik ODTW, ketersediaan sumber daya, jarak dan kondisi lingkungan wisata, semuanya ikut menentukan keputusan tersebut. Berikut diuraikan beberapa pertimbangan penting yang dilakukan seseorang sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan, yaitu biaya, daerah tujuan wisata, bentuk perjalanan, waktu dan lama berwisata, akomodasi yang digunakan moda transportasi, dan lainnya.

2.1.2.3.1 Biaya

Biaya merupakan pertimbangan yang paling substantif untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan berwisata. Hal ini akan berdampak pada penentuan bagaimana bentuk, tujuan dan waktu berwisata, tipe penginapan, moda angkutan serta jasa lain yang digunakan. Bagi wisata pemula, biaya yang besar dapat menjadi beban berat, sehingga pilihan destinasi diberikan pada daerah yang nilai tukar mata uang lokal sangat rendah. Sedikit berbeda dengan wisatawan pemula, untuk wisatawan berpengalaman yang lebih mengutamakan kepuasan dan pengalaman total wisata sebagai pertimbangan utama. Oleh sebab itu ketersediaan informasi yang akurat dan terbaru tentang pengembangan ekonomi dan finansial di daerah destinasi wisata sangat penting untuk memudahkan calon wisatawan menentukan biaya.

2.1.2.3.2 Daerah Tujuan Wisata

Daerah tujuan wisata adalah salah satu faktor penyebab kunjungan wisatawan. Oleh karena itu peran daerah tujuan sangat penting dalam industri pariwisata. Kegiatan pariwisata menawarkan produksi jasa yang memberikan kenyamanan kepada konsumen. Kepuasan konsumen ditentukan oleh berbagai faktor seperti tujuan wisata, produk wisata, promosi, peran penduduk lokal, dan sistem organisasi.

Pemilihan lokasi destinasi wisata juga penting untuk mengambil keputusan berwisata. Pesatnya pertumbuhan jumlah daerah tujuan wisata lama maupun baru

membuat orang menjadi semakin tidak semudah untuk melakukan pilihan. Faktor daya tarik suatu daerah dan kematangan pribadi atau pengalaman wisata seseorang sangat menentukan pilihan yang dimaksud. Biasanya semakin banyak pengalaman wisata, semakin mudah melakukan pilihan destinasi.

2.1.2.3.3 Bentuk Perjalanan

Bentuk perjalanan yang akan dilakukan biasanya ada tiga bentuk, yakni; pertama, berkelompok dalam jumlah besar dan diorganisasi oleh biro perjalanan (*exclusive tourism*); kedua, individual atau kelompok kecil (misalnya keluarga) yang diatur sendiri oleh wisatawan yang bersangkutan; dan ketiga, gabungan keduanya. Sebagai contoh, sebagai besar perjalanan wisata di Indonesia yang dilakukan oleh karyawan grup-grup perusahaan luar negeri, terutama Jepang, termasuk dalam kategori yang disebut pertama. Daerah tujuan, waktu, kegiatan wisata, dan jenis penginapan mereka telah diatur oleh biro perjalanan.

2.1.2.3.4 Waktu dan Lama Berwisata

Lama berwisata juga menjadi pertimbangan tersendiri. Dalam hal ini faktor ketersediaan waktu luang dan uang kembali memainkan peran penting. Bukti-bukti nyata menunjukkan beberapa waktu luang (musim libur) menjadi salah satu faktor penentu besar kecilnya arus wisatawan. Wisatawan mancanegara secara umum cenderung lebih ketat dalam pengaturan waktu berwisata ini. Jauh sebelum keberangkatan mereka telah melakukan perencanaan perjalanan mulai alokasi

waktu perjalanan, kunjungan di ODTW, jenis rekreasi yang akan dilakukan dan sebagainya. Keterlambatan satu hari saja akan beresiko bagi keseluruhan agenda wisatanya, mulai dari penambahan biaya, pengurusan tiket perjalanan, sampai ke penyesuaian jadwal kepulangan dengan berbagai risiko. Oleh sebab itu mereka tidak toleran terhadap pengaturan waktu yang tidak tepat di daerah tujuan wisata.

2.1.2.3.5 Penginapan yang Digunakan

Jenis penginapan sangat tergantung pada perkembangan industri pariwisata. Di negara maju, penginapan pribadi daerah wisata, motel, dan karavan merupakan beberapa alternatif pilihan yang mudah diperoleh. Sementara di negara berkembang seperti Indonesia peluang pilihan pada akomodasi hotel dan losmen sama besar dengan akomodasi di rumah keluarga atau kerabat. Seleksi fasilitas akomodasi ini perlu dilakukan secara matang karena selain menyakut biaya juga terkait dengan kenyamanan dan kepraktisan. Jenis akomodasi hotel secara umum memberikan kesan kemewahan dan kenyamanan, tetapi tidak selamanya menjadi pilihan terbaik, terutama jika jenis wisata yang akan dilakukan, misalnya adalah *tracking*.

2.1.2.3.6 Moda Transportasi

Calon wisatawan sering dihadapkan pada persoalan yang tidak sederhana, karena bukan hanya menyangkut soal pilihan jenis transportasi (darat, laut, dan udara), tetapi juga pada ketersediaan dan faktor kenyamanan dari daerah/negara asal dan selama di daerah tujuan wisata. Infrastruktur jalan yang buruk sering

membuat wisatawan tidak memilih moda transportasi darat, meskipun sebenarnya menjalur jalur ini, mereka dapat menikmati intraksi alam dan budaya.

Pertimbangan pilihan pada jalur laut dan udara biasanya lebih mudah. Sebagai gambaran, dalam beberapa tahun terakhir terlihat pertumbuhan maskapai penerbangan dalam negeri semakin pesat. Belasan maskapai penerbangan domestik melayani jalur-jalur penumpang ke berbagai ibu kota provinsi. Jutaan penumpang pesawat tiap tahun menunjukkan semakin besarnya peluang masyarakat untuk memilih moda transportasi dalam menjalankan kegiatan wisatanya.

2.1.2.3.7 Jasa Lain

Termasuk dalam hal ini layanan lain yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan wisata seperti pemandu, souvenir, fotografi, perawatan kesehatan, hiburan, dan sebagainya. Perlu diketahui pula bahwa faktor kepribadian seseorang berperan penting dalam memilih dan memilah berbagai hal yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan berwisata.

Orang-orang yang memiliki kepribadian tertutup (*introvert*) cenderung lebih sulit dipengaruhi untuk melakukan wisata dari pada mereka yang bersifat terbuka (*extrovert*). Disamping itu daerah tujuan wisata, atraksi dan kegiatan wisata mereka juga berbeda. Sebagai contoh, sangat sulit mengharapkan wisatawan yang bersifat tertutup untuk terlibat dalam arum jeram, panjat tebih, atau kegiatan yang menantang bahaya. Sama sulitnya mengajak wisatawan yang kepribadian terbuka untuk melakukan kegiatan wisata museum-museum.

2.1.2.4 Penawaran Pariwisata

Penawaran wisata merupakan produk yang diberikan kepada wisatawan untuk dapat dinikmati. Selanjutnya dijelaskan oleh McIntosh, Goeldner dan Ritchie (1995). Bahwa aspek produk wisata dapat digolongkan kedalam empat kategori yaitu: (i) sumber daya alam (udara, iklim, pegunungan, lembah, flora dan fauna, mata air, pantai bentang alam); (ii) infrastruktur (sistem instalasi air bersih, sistem pembuangan air limbah, jalur gas, sistem listrik dan telekomunikasi, sistem drainase) termasuk lain yang mencakup jalan raya, pelabuhan udara, kereta api, jalan, tempat parkir, taman, lampu jalan, pelabuhan laut, stasiun bus dan kereta api, hotel, motel, restoran, pusat perbelanjaan, museum, tempat hiburan, pertokoan; (iii) transportasi (pesawat terbang, kapal laut, kereta api, bis, taksi, tren); (iv) sumber daya kebudayaan dan keramahtamahan penduduk.

Menurut Wahab (1996), penawaran pariwisata ditandai oleh tiga ciri khas utama:

1. Merupakan penawaran jasa-jasa. Dengan demikian apa yang ditawarkan itu tidak mungkin ditimbun dan harus dimanfaatkan di mana produk itu berada.
2. Yang ditawarkan itu sifatnya kaku (rigid) dalam arti bahwa dalam usaha pengadaianya untuk keperluan wisata, sulit sekali untuk mengubah sasaran penggunaannya diluar pariwisata.
3. Karena pariwisata belum menjadi kebutuhan pokok manusia, maka penawaran pariwisata harus bersaing ketat dengan penawaran barang-barang dan jasa-jasa yang lain. Dalam hal ini hukum substitusi sangat kuat berlaku.

Produk wisata merupakan produk yang diperuntungkan bagi dikonsumsi oleh seseorang selama melakukan kegiatan wisata. Freyer (2011), menyatakan bahwa jasa tidak lain adalah layanan yang diterima wisatawan ketika mereka memanfaatkan (mengkonsumsi) produk tersebut. Jasa ini biasanya tidak tampak (*intangible*), bahkan seringkali tidak disarankan. Butkat dan Medlik (1981), menyatakan bahwa jasa wisata adalah gabungan produk komposit yang terangkum dalam atraksi, transport, akomodasi dan hiburan. Banyak kalangan mempersepsikan bahwa produk dan jasa sebagai potensi wisata. Produk dan jasa harus sudah siap dikonsumsi oleh wisatawan. Sebaiknya potensi wisata adalah semua objek (alam, budaya, buatan) yang memerlukan banyak penanganan agar dapat memberikan nilai daya tarik bagi wisatawan. Misalnya, gunung tinggi dan indah dipandang, dan pantai landai berpasir putih di pulau terisolasi termasuk potensi wisata karena mempunyai peluang untuk dijadikan sebagai daya tarik wisata.

Berikut akan dijelaskan tentang penawaran wisata yang sering disebut triple “A” yakni *atraksi*, *aksesibilitas*, dan *amenitas*:

1. *Atraksi*, secara singkat diartikan sebagai objek wisata (baik yang bersifat tangible maupun intangible) yang memberikan kenikmatan kepada wisatawan. Atraksi dapat dibagi menjadi tiga, yakni alam, budaya, dan buatan.
2. *Aksesibilitas*, adalah sesuatu yang dapat memberi kemudahan kepada wisatawan untuk dapat berkunjung pada suatu tempat. Komponen-komponen yang perlu diperhatikan dari aksesibilitas adalah transportasi, infrastruktur, peraturan pemerintah dan prosedur operasional. Objek wisata merupakan

akhir perjalanan wisata dan harus memenuhi syarat aksesibilitas, artinya objek wisata harus mudah dicapai dan mudah untuk ditemukan. Inskip (1944), menyatakan bahwa aksesibilitas mencakup keseluruhan infrastruktur transportasi yang menghubungkan wisatawan dari objek wisata satu ke yang lain dan selama di daerah tujuan wisata, mulai dari darat, laut, sampai udara.

3. *Amenitas* adalah infrastruktur yang sebenarnya tidak langsung terkait dengan pariwisata tetapi sering menjadi kebutuhan dari wisatawan. Bank, penukaran uang, telekomunikasi, usaha persewaan (rental), penerbit dan penjual buku panduan wisata, seni pertunjukan (teater, bioskop, pub, dan lain-lain) dapat digolongkan kedalam bagian ini.

Plog (1991), mengungkapkan bahwa semakin lengkap dan terintergrasi ketiga unsur tersebut didalam produk wisata maka semakin kuat posisi penawaran dalam sistem kepariwisataan. Keunikan, otentisitas, orisinalitas dan keragaman merupakan empat hal yang terkait atas kualitas produk yang ditawarkan. Keunikan diartikan sebagai kombinasi kelangkaan dan daya tarik yang khas melekat pada suatu objek wisata, seperti contoh Komodo dan habitatnya di pulau Komodo.

2.1.2.5 Dampak Pariwisata Terhadap Ekonomi

Pariwisata memiliki dampak langsung, tidak langsung, dan terinduksi pada ekonomi lokal, seringkali hal ini dapat terjadi sebagian besar berbeda antar negara, berdasarkan struktur sektor tetapi sebagian besar pentingnya tentang beberapa baik aktivitas pariwisata terkait dengan ekonomi lokal. Lebih besar keterkaitan

umumnya diterjemahkan kedalam tingkat yang lebih tinggi dari aktivitas ekonomi lokal (dan pertumbuhan), yang cenderung terjadi ketika perusahaan pariwisata mendapatkan barang dan jasanya (termasuk tenaga kerja) secara lokal sementara tingkat hubungan ekonomi yang rendah terjadi ditempat usaha pariwisata berbeda bergantung pada impor (termasuk staf) untuk memenuhi permintaan mereka.

Dampak keseluruhan dari sektor adalah jumlah dari efek langsung, tidak langsung dan induksi yakni sebagai berikut:

1. Dampak langsung: mewakili PDB yang dihasilkan oleh kegiatan yang berhubungan langsung dengan pariwisata seperti hotel, agen perjalanan, maskapai penerbangan, dan operator tur juga sebagai restoran dan aktivitas lain yang melayani pariwisata.
2. Dampak tidak langsung, yaitu dampak yang timbul karena kegiatan yang dilakukan sektor, dan merupakan fungsi dari tiga faktor berbeda:
 - a. Penanaman modal dalam pariwisata: termasuk penanaman modal di semua sektor yang secara langsung terlibat dalam industri pariwisata serta pengeluaran oleh perusahaan di sektor lain pada aset pariwisata seperti transportasi atau akomodasi.
 - b. Belanja pemerintah untuk pariwisata: belanja pemerintah untuk mendukung sektor pariwisata, yang dapat mencakup belanja nasional dan daerah. Kegiatan termasuk promosi pariwisata, layanan pengunjung, administrasi dll.

- c. Efek rantai pasokan: ini mewakili pembelian barang dalam negeri dan jasa, sebagai masukan untuk produksi hasil akhir mereka, oleh perusahaan di dalamnya sektor pariwisata.
- d. *Induced impacts*: mewakili kontribusi pariwisata yang lebih luas melalui pengeluaran mereka yang secara langsung atau tidak langsung dipekerjakan oleh pariwisata sektor (B. Purba et al., 2019; Bonaraja Purba et al., 2019; Purba, 2019a,2019b).

2.1.2.6 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan sektor pariwisata terdiri dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan usaha-usaha pariwisata yang bergerak dibidang pariwisata atau yang berhubungan dengan pariwisata. Penerimaan sektor pariwisata terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah yang menjadi kontribusi untuk pendapatan asli daerah yang dapat diperoleh dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan yang berdiri disekitar daerah wisata.
2. Hasil Retribusi Daerah dari sektor pariwisata dapat diperoleh dari retribusi parkir, retribusi biaya masuk, retribusi penginapan, retribusi perijinan di bidang pariwisata dan sebagainya.

Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat dan berkembang dengan baik apabila sektor pariwisata dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai potensi daerah wisata yang akan mendukung perolehan jumlah retribusi suatu daerah.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto

2.1.3.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penjumlahan dari nilai tambah dalam suatu periode tertentu di wilayah tertentu. PDRB terbagi menjadi dua jenis yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. (BPS, 2015). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut. Dengan demikian PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah sangat bergantung terhadap potensi sumber daya alam dan faktor produksi daerah tersebut. Terdapatnya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB yang bervariasi pada setiap daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Data PDRB juga merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian daerah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain:

- a. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu daerah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.

- b. PDRB atas harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
- c. Distribusi PDRB atas harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
- d. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- e. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

2.1.3.2 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Harga Konstan

PDRB merupakan salah satu indikator penting dalam pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam suatu periode tertentu (setahun) yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu negara atau suatu daerah, ada dua cara dalam penyajian PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Menurut Bank Indonesia (2013), PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi

suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

2.1.3.3 Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka dalam Produk Domestik Regional Bruto yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran.

1. Pendekatan Produksi

Menurut Pendekatan Produksi ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya dalam waktu satu tahun).

Rumus:

$$\text{PDRB} = \text{harga semua barang diproduksi dan dijual} \\ + \text{harga semua layanan diproduksi dan dijual}$$

2. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan Pendapatan yang dimaksud disini yaitu PDRB menurut Badan Pusat Statistik (2008), merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu

wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya dalam waktu satu tahun). Balas jasa yang dimaksud dalam faktor produksi yaitu Upah dan Gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

Rumus:

$$\mathbf{PDRB = R + W + I + P}$$

Keterangan:

- R = Pendapatan dari upah, gaji dan lainnya
- W = Pendapatan bersih dari sewa
- I = Pendapatan dari bunga
- P = Pendapatan dari keuntungan perusahaan

3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan Pengeluaran dalam Badan Pusat Statistik (2008), PDRB menurut pendekatan ini adalah semua komponen penggunaan dari permintaan akhir yang terdiri dari beberapa pengeluaran yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Lembaga *Non Profit* yang melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, Perubahan Inventori, Ekspor Barang dan Jasa, Impor Barang dan Jasa.

Rumus:

$$\mathbf{PDRB = C + I + G + (X - M)}$$

Keterangan:

- C = Konsumsi rumah tangga
- I = Investasi

G = Konsumsi Pemerintah
X = Ekspor
M = Impor

2.1.4 Inflasi

2.1.4.1 Pengertian Inflasi

Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Definisi lain inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaikkan secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang lain.

Berhubung inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, maka untuk mengukur perubahan laju inflasi (*inflation rate*) dari waktu ke waktu pada umumnya digunakan suatu angka indeks yang disebut Indeks Harga Konsumen (IHK). Angka indeks tersebut disusun dengan memperhitungkan sejumlah barang dan jasa yang dapat digunakan untuk menghitung besarnya angka laju inflasi. Laju inflasi yang paling umum dan dikenal oleh masyarakat adalah laju inflasi untuk menghitung perubahan harga barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi masyarakat. Angka indeks tersebut dihitung secara periodik dan pada umumnya dilakukan secara bulanan, kuartalan dan tahunan.

Selain dihitung berdasarkan IHK, inflasi dapat dihitung berdasarkan Indeks Biaya Hidup (IBH), yaitu untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa

kebutuhan hidup masyarakat. Indeks Harga Produsen (IHP) untuk mengukur perubahan harga bagi produsen. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) untuk mengukur perubahan harga barang dan jasa perdagangan. Serta dapat dihitung dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

2.1.4.2 Faktor Penyebab Inflasi

Inflasi merupakan suatu masalah ekonomi yang sangat besar khususnya bagi negara-negara berkembang. Sumber inflasi di negara berkembang berasal dari beberapa faktor, seperti defisit anggaran belanja pemerintah yang kemudian berdampak pada peningkatan jumlah uang beredar. Dilihat dari faktor-faktor utama yang menyebabkan inflasi, inflasi dapat disebabkan dari sisi permintaan, sisi penawaran dan ekspektasi, maupun gabungan dari ketiga faktor tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut dijelaskan dalam buku Kebanksentralan seri inflasi (Suseno dan Siti Astiyah 2009-11-17) yaitu sebagai berikut:

1. Inflasi yang disebabkan faktor permintaan (*Demand Pull Inflation*)

Inflasi yang disebabkan oleh permintaan timbul karena adanya pertambahan jumlah uang beredar dalam jangka pendek. Bertambahnya jumlah uang beredar mengakibatkan suku bunga mengalami penurunan sehingga jumlah konsumsi dan investasi meningkat secara keseluruhan. Dengan adanya peningkatan permintaan maka secara otomatis mendorong peningkatan harga-harga secara keseluruhan. Kejadian tersebut, disebut sebagai inflasi permintaan atau *demand pull inflation*.

2. Inflasi Penawaran atau *cost push inflation/ supply shock inflation*

Inflasi penawaran adalah inflasi yang disebabkan faktor penawaran yang memicu kenaikan harga penawaran atas suatu barang, termasuk barang-barang yang harus diimpor, serta harga barang-barang yang dikendalikan oleh pemerintah seperti kenaikan harga minyak dunia, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Inflasi penawaran disebabkan oleh adanya kenaikan biaya produksi secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Selain itu inflasi ini disebabkan oleh faktor alam seperti kondisi cuaca yang tidak menentu yang mengakibatkan gagalnya panen, faktor sosial ekonomi seperti adanya hambatan dalam distribusi barang, maupun faktor-faktor yang timbul karena kebijakan pemerintah seperti kebijakan tarif, pajak dan pembatasan impor.

3. Inflasi Campuran (*Mixed Inflation*)

Inflasi campuran merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan penawaran, perilaku permintaan dan penawaran tidak seimbang ataupun permintaan terhadap barang dan jasa bertambah. Hal tersebut mengakibatkan faktor produksi dan persediaan barang menjadi turun. Sementara, substitusi atau barang pengganti terbatas atau bahkan tidak ada. Keadaan seperti itu pada akhirnya dapat menyebabkan harga-harga menjadi naik.

4. Inflasi Ekspektasi (*Expected Inflation*)

Inflasi tidak hanya disebabkan oleh faktor permintaan dan penawaran, namun inflasi dapat disebabkan oleh adanya ekspektasi para pelaku ekonomi atau disebut inflasi ekspektasi (Gordon 2007:15). Inflasi ekspektasi adalah inflasi yang terjadi akibat adanya perilaku masyarakat secara umum yang bersifat adatif atau

foward looking. Dalam hal ini, masyarakat menilai bahwa di masa yang akan datang kondisi ekonomi menjadi semakin baik dari masa sebelumnya. Harapan masyarakat tersebut dapat menyebabkan terjadinya *demand pull inflation* maupun *cost push inflation*, tergantung pada harapan masyarakat dan kondisi persediaan barang dan faktor produksi saat itu dan masa mendatang.

2.1.4.3 Dampak Inflasi

Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap perekonomian, tergantung pada tingkat inflasi yang terjadi. Adapun dampak positif dan dampak negatif inflasi sebagaimana diposting pada blog (Divo, Husin dan Setiawan) adalah:

1. Dampak positif dari inflasi
 - a. Bagi perekonomian

Jika tingkat inflasi ringan, dapat membawa pengaruh positif dalam arti dapat mendorong perekonomian yang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung dan berinvestasi.

b. Bagi pengusaha

Dampak inflasi terhadap penurunan nilai mata uang tidak dapat merugikan sebagian kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap. Contohnya seperti pengusaha, karena para pengusaha mendapatkan penghasilan berdasarkan keuntungan.

c. Bagi debitur

Debitur dapat merasa diuntungkan dengan adanya inflasi, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam.

d. Bagi produsen

Bagi produsen, inflasi pun dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi dari pada kenaikan biaya produksi.

2. Dampak negatif dari inflasi

a. Bagi perekonomian

Pada masa hiperinflasi atau inflasi yang tidak terkendali, kondisi perekonomian menjadi “lesu” dan sulit berkembang. Masyarakat tidak bersemangat untuk bekerja, menurunkan minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi karena nilai mata uang semakin menurun.

b. Bagi pegawai atau karyawan berpenghasilan tetap

Dampak inflasi terhadap penurunan nilai mata uang dapat merugikan kelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap seperti pegawai negeri, pegawai swasta dan kaum buruh, karena secara riil pendapatan mereka dapat menurun.

c. Bagi kreditur

Kreditur dapat mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian utang debitur lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman.

d. Bagi produsen

Bagi produsen inflasi yang tinggi sangat berpengaruh pada kenaikan harga-harga kebutuhan produksi yang kemudian berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi.

e. Bagi pemerintah

Tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada rencana pembangunan pemerintah dan mengacaukan rencana anggaran pendapatan dan belanja pemerintah (RAPBN/RAPBD).

2.1.5 Pandemi COVID-19

COVID-19 adalah salah satu penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus bernama Sar Cov-2. Wabah ini merupakan suatu penyakit non alam yang berasal dari makanan yang di konsumsi oleh manusia, yaitu kelelawar atau marsego. Wabah ini pertama kali timbul pada salah satu negara besar yaitu negara Cina, tepatnya di Kota Wuhan yang sampai saat ini masih tersebar luas di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Wabah ini telah tersebar ke seluruh dunia, termasuk negara Indonesia dengan jumlah kasus yang terus menerus bertambah dan penyebarannya yang semakin luas. Per tanggal 15 April 2020, jumlah kasus di Indonesia telah mencapai lebih dari 5.000 kasus. Wabah ini berpotensi yang akan menyebabkan kontraksi hampir seluruh sektor perekonomian (Revindo, 2020).

Manusia banyak tertular akan wabah ini dikarenakan wabah ini merupakan penyakit baru jadi manusia belum punya kekebalan tubuh terhadap wabah ini. Diprediksi akan memperpanjang masa pandemi, sehingga masyarakat harus siap dengan keseimbangan dan kehidupan baru pada kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang pariwisata, aspek kesehatan, sosial dan ekonomi. Pariwisata harus berjalan beriring dengan saling mendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan untuk itu berbagai kebijakan percepatan dalam penanganan wabah ini harus tetap mendukung sampai perekonomian, pariwisata, dan aspek sosial masyarakat (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

2.1.5.1 Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pariwisata

Masa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada semua sektor termasuk dalam industri pariwisata, industri pariwisata sebelumnya di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sektor pariwisata yang dicanangkan menjadi pemberi kontribusi besar terhadap devisa negara di tahun 2020 menjadi runtuh dikarenakan wabah ini. Adanya wabah ini telah memaksa masyarakat untuk adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan sosial dan ekonomi. Peradaban tatanan kemanusiaan yang mengalami pergeseran kearah yang jauh lebih berbeda dari kondisi sebelumnya. Segala aktivitas masyarakat yang akan dilkerjakan di masa pandemi, dipaksa harus di sesuaikan dengan standar protokol kesehatan. Adapun dampak wabah ini terhadap pariwisata di Indonesia berpengaruh terhadap:

1. Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada era otonom daerah pada sektor kepariwisataan, dengan sifatnya yang multi sektor yang berpotensi menghasilkan pendapatan yang besar. Meningkatnya sektor pariwisata akan menghasilkan pendapatan wilayah diantaranya perizinan usaha pariwisata, retribusi masuk objek wisata serta penyerapan tenaga kerja dari sektor formal maupun informal (Asyiwati, 2017). Namun adanya wabah ini menjadikan sektor pariwisata yang dulunya diharapkan mampu memberi kontribusi terbesar bagi devisa negara menjadi terhambat. Terjadinya penurunan jumlah pengunjung yang cukup drastis di berbagai destinasi wisata khususnya di negara Indonesia.

Destinasi pariwisata yang diharapkan mampu meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat di daerah menjadi lumpuh karena adanya wabah ini. Pendapatan dari berbagai sisi diantaranya retribusi masuk obyek wisata, pajak hotel, restoran dan industri makanan serta perijinan usaha pariwisata lumpuh karena tidak adanya pengunjung atau wisatawan baik mancanegara ataupun domestik. Berbagai hotel dan rumah makan yang masuk dalam bagian dari sektor pariwisata benar-benar merasakan dampak dari wabah ini. Bahkan tidak sedikit rumah makan dan hotel yang terpaksa harus tutup dan bahkan memutuskan hubungan kerja para pekerjanya karena harus menghitung resiko yang ditanggungnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Didalam penelitian ini terdapat pendokumentasian dan pengkajian hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang bersangkutan dengan tema analisis faktor-

faktor yang mempengaruhi PAD sektor pariwisata. Hal ini berguna bagi peneliti sebagai pembanding dan juga untuk mengetahui persamaan atau perbedaan yang disedang dilakukan dengan peneliti terdahulu. Tabel penelitin terdahulu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Femy Nadia Rahman, Herniwati Retno Handayani : 2013 “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Kudus”	Tujuan : Menganalisis pengaruh variabel Jumlah Kedatangan Wisatawan, Daya Tarik Wisata, dan Pendapatan Perkapita Sektor Pariwisata di Kabupaten Kudus Variabel terikat : Penerimaan Sektor Pariwisata Variabel bebas : Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Obyek Wisata, Pendapatan Perkapita	Secara parsial variabel jumlah wisatawan, jumlah daya tarik wisata, dan variabel pendapatan perkapita berpengaruh signifikan. Dan dari ketiga variabel tersebut yang paling dominan pengaruh terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Kudus adalah jumlah variabel pariwisata.	Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan analisis regresi linier berganda • Obyek penelitian yang sama yaitu, kunjungan wisatawan Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini terjadi di Kabupaten Kudus • Jangka waktu penelitian ini 1997-2011

2	<p>Oktavianus Keo, Yustina Paulina Penu, Yuliana Sedho : 2020</p> <p>“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Ende”</p>	<p>Tujuan : Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan daerah dari pariwisata dan untuk mengetahui seberapa besar pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.</p> <p>Variabel terikat : Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata</p> <p>Variabel bebas : Jumlah Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, Retribusi Obyek Wisata</p>	<p>Hasil menunjukkan bahwa secara simultan variabel jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan retribusi obyek wisata mempengaruhi PAD sektor pariwisata di Kabupaten Ende dengan tingkat signifikan = 5%, sedangkan secara parsial jumlah wisatawan berpengaruh signifikan dan retribusi terhadap objek wisata berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PAD sektor pariwisata, sedangkan hotel tingkat hunian tidak berpengaruh terhadap PAD di sektor pariwisata.</p>	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan data sekunder • Variabel bebas yang sama yaitu jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas terdapat retribusi obyek wisata • Jangka waktu penelitian ini dari 2012-2016
3	<p>Maria Yanti Akoit, Natalia Lily Babulu : 2021</p> <p>“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Timor Tengah Utara”</p>	<p>Tujuan : Mengetahui pengaruh dari variabel jumlah wisatawan, jumlah hunian hotel, jumlah restoran/rumah makan dan jumlah toko souvenir terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten TTU.</p> <p>Variabel terikat : Penerimaan Sektor Pariwisata</p> <p>Variabel bebas : Jumlah Wisatawan, Jumlah Hunian Hotel, Jumlah Restoran/Rumah makan, jumlah toko souvenir</p>	<p>Secara simultan variabel jumlah wisatawan, jumlah hunian hotel, jumlah restoran/rumah makan dan jumlah toko souvenir berpengaruh signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata Kabupaten TTU dengan nilai R dan R square masing-masing sebesar 0,977 dan 0,955.</p>	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan data sekunder • Variabel bebas sama yaitu jumlah wisatawan <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangka waktu penelitian ini dari tahun 2008-2018 • Pada penelitian ini variabel terikat jumlah hunian hotel, jumlah restoran/rumah makan, jumlah toko souvenir
4	<p>I Gede Yoga Suastika, I Nyoman Mahaendra Yasa : 2017</p> <p>“Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal Wisatawan dan Tingkat Hunian</p>	<p>Tujuan : Menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, dan tingkat hunian hotel terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Penelitian</p>	<p>Bahwa jumlah kunjungan wisatawan dan tingkat hunian hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan lama tinggal wisatawan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada</p>	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variabel bebas yang sama yaitu, jumlah kunjungan wisatawan, lama menginap wisatawan, tingkat hunian hotel

	Hotel Terhadap Ali Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali”	ini bersumber dari data sekunder yaitu data time series yang dimulai dari tahun 2010 - 2015. Variabel terikat : Pendapatan asli daerah, kesejahteraan masyarakat Variabel bebas : Jumlah kunjungan wisatawan, lama menginap wisatawan, tingkat hunian hotel	kabupaten/kota di Provinsi Bali.	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan data sekunder Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> Pada penelitian ini variabel terikatnya kesejahteraan masyarakat
5	Andhalia Liza Marie, Rintis Eko Widodo : 2020 “Analisis Faktor Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dan Tingkat Penginapan Hotel Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sub Sektor Pariwisata Pada Industri Pariwisata Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2007 – 2018”	Tujuan : Melakukan analisis faktor kunjungan wisatawan mancanegara atau asing dan tingkat hunian pada hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah sub sektor pariwisata pada industri pariwisata di DIY dalam kurun waktu tahun 2007 sampai tahun 2018. Variabel terikat : Penerimaan PAD Sub Sektor Industri Pariwisata Variabel bebas : Jumlah Kunjungan WisatawanMancanegara/ Asing, Jumlah Hunian Penginapan Pada Hotel	Terdapat pengaruh positif antara jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat penginapan hotel terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sub Sektor Pariwisata di DIY tahun 2007-2018.	Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> Variabel terikat sama yaitu PAD sektor pariwisata Menggunakan data sekunder Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> Rentan waktu di penelitian ini 2007-2018
6	Naning Widiyanti, Diah Setyawati Dewanti : 2017 “Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015”	Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah obyek wisata, PDRB, jumlah hotel, jumlah restoran dan rumah makan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010-2015. Varibel terikat : Pendapatan asli daerah sektor pariwisata Variabel bebas : Jumlah obyek wisata, PDRB, jumlah hotel, jumlah restoran dan rumah makan	Hasil yang menunjukkan bahwa variabel PDRB, jumlah hotel, jumlah restoran dan rumah makan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata, sedangkan variabel jumlah obyek wisata tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata di DIY.	Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> Variabel terikat yang sama yaitu pendapatan asli daerah sektor pariwisata Variabel bebas yang sama yaitu, PDRB, jumlah obyek wisata Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> Rentan waktu di penelitian ini 2010-2015 Variabel bebas terdapat jumlah hotel

7	<p>Rahma Muin : 2016</p> <p>“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Polewali Mandar”</p>	<p>Tujuan : untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan untuk mengetahui faktor apa yang berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar.</p> <p>Variabel terikat : Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Variabel bebas : Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, Dana perimbangan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis satu yang menyatakan terdapat pengaruh parsial dan signifikan yakni faktor Dana Perimbangan, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagian diterima sebagian ditolak</p>	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Varibael bebas yang sama yaitu, pertumbuhan ekonomi, inflasi • Menggunakan analisis regresi linier berganda <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurun waktu penelitian ini 1997-2011
8	<p>Sagung Istri Santhi Permana Sari, Ni Nyoman Yuliarmi : 2018</p> <p>“Pengaruh Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal, Tingkat Hunian, dan Jumlah Obyek Wisata Terhadap PAD Kabupaten Karangasem”</p>	<p>Tujuan : Menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, tingkat hunian hotel, dan jumlah objek wisata terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karangasem.</p> <p>Variabel terikat : Pendapatn Asli Daerah</p> <p>Variabel bebas : Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Obyek Wisata</p>	<p>Jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, tingkat hunian hotel, dan jumlah objek wisata berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karangasem dan secara parsial jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karangasem, sedangkan lama tinggal wisatawan, tingkat hunian hotel, dan jumlah objek wisata tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karangasem.</p>	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan analisis regresi linier berganda • Obyek penelitian yang sama, jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, tingkat hunian hotel, dan jumlah objek wisata <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini terjadi di kabupaten karangasem provinsi bali
9	<p>Iwan Susanto : 2014</p> <p>“Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang Tahun 1998 – 2012)”</p>	<p>Tujuan : untuk mengetahui pengaruh serta variabel yang dominan dari variabel independen yaitu variabel PDRB, Penduduk, dan Inflasi, sedangkan variabel yang dipengaruhi merupakan variabel dependen yaitu variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang,</p>	<p>bahwa secara simultan variabel PDRB, penduduk, dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, secara parsial PDRB, Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Inflasi mempunyai nilai yang tidak signifikan atau hanya</p>	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan data sekunder • Varibel bebas yang sama yaitu, PDRB dan inflasi <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurun waktu penelitian ini dari 1998-2021

		dan studi kasus pada waktu tahun 1998 – 2012. Varibael terikat : Pendapatan asli daerah Variabel bebas : PDRB, penduduk, dan inflasi	mempunyai pengaruh rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena Inflasi merupakan dampak pergerakan ekonomi secara positif ataupun negatif.	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel terikat penelitian ini pendapatan asli daerah
10	Ni Made Rediteani1 Nyoman, Djinar Setiawina : 2018 “Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pajak Hotel Restoran dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Denpasar”	Tujuan : untuk menganalisis pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal, dan tingkat hunian hotel terhadap pajak hotel restoran dan pertumbuhan ekonomi di kota Denpasar Variabel terikat : Pajak restoran dan pertumbuhan ekonomi Variabel bebas : Jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal, tingkat hunian hotel	Bahwa jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pajak hotel restoran sedangkan tingkat hunian hotel tidak berpengaruh langsung dan signifikan. Jumlah kunjungan wisatawan tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan lama tinggal, tingkat hunian hotel, dan pajak hotel restoran berpengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.	Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan data sekunder • Variabel bebas yang sama yaitu, jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal, tingkat hunian hotel Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> • Variabel terikat penelitian ini pajak restoran, pertumbuhan ekonomi

2.3 Kerangka Pemikiran

Salah satu sumber penerimaan yang juga dinilai cukup potensial dalam meningkatkan PAD adalah pendapatan yang berasal dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata adalah salah satu sektor yang potensial karena dapat memberikan efek ganda (*multiplier*) yang dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya. Keberhasilan pengembangan industri kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun mancanegara, lama menginap wisatawan, tingkat hunian hotel, produk domestik regional bruto, dan tingkat inflasi.

1. Pengaruh Jumlah Objek Wisata terhadap PAD Sektor Pariwisata

Pengaruh Jumlah Obyek Wisata Terhadap PAD Sektor pariwisata. Terdapat hubungan yang positif antara Jumlah Obyek Wisata dengan PAD Sektor Pariwisata. Salah satu unsur penting dalam dunia kepariwisataan adalah objek atau daya tarik wisata. Objek dan daya tarik wisata adalah salah satu produk wisata dan salah satu aset yang dapat dijual kepada wisatawan dan dapat menyukseskan program pemerintah dalam melestarikan adat dan budaya bangsa atau suatu daerah. Dengan adanya objek dan daya tarik wisata yang menarik, tentunya dapat menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata dengan berkunjung ke objek wisata maka wisatawan harus membayar tiket masuk objek wisata tersebut. Pembayaran tiket masuk tersebut masuk ke dalam jalur retribusi tempat rekreasi dimana pemerintah daerah dapat memasukkan retribusi tersebut sebagai sumber pendapatan asli daerah, khususnya pendapatan asli daerah sektor pariwisata.

2. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap PAD Sektor Pariwisata

Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan Terhadap PAD Sektor pariwisata. Terdapat hubungan yang positif antara Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan PAD Sektor Pariwisata. Kedatangan wisatawan ke daerah tujuan wisata (DTW) akan membawa dampak positif terhadap perekonomian daerah yang dikunjunginya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Yoeti dalam bukunya “Pengantar Ilmu Pariwisata” tahun 1985 menyatakan bahwa kedatangan wisatawan mancanegara atau domestik merupakan sumber penerimaan bagi daerah atau negara, baik dalam

bentuk devisa atau penerimaan pajak dan retribusi lainnya, disamping dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Prof. Dr. Mubyarto, mantan Asisten Bidang Pemerataan Pembangunan dan Urusan Kemiskinan pada Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan dalam buku “Ekonomi Kerakyatan” mengatakan bahwa “Pariwisata yang berkembang akan meningkatkan ketertarikan wisatawan untuk berkunjung merupakan suatu sektor ekonomi yang terbukti mampu mengentaskan kemiskinan suatu daerah. Pembangunan industri pariwisata mampu mengentaskan kemiskinan adalah industri yang mempunyai *trickle down effect* bagi masyarakat setempat” Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke daerah tujuan wisata akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak maupun retribusi. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan pajak dan retribusi diharapkan akan meningkatkan pendapatan asli daerah sektor pariwisata.

3. Pengaruh Lama Menginap Wisatawan terhadap PAD Sektor Pariwisata

Pengaruh Lama Menginap Wisatawan Terhadap PAD Sektor pariwisata. Terdapat hubungan yang positif antara Lama Menginap Wisatawan dengan PAD Sektor Pariwisata. Secara teoritis (Apriori dalam Nasrul, 2010), semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya dapat menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya

kegiatan konsumtif baik dari wisatawan nusantara maupun mancanegara, maka dapat memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tingginya arus wisatawan maka pendapatan sektor pariwisata juga semakin meningkat.

4. Pengaruh Tingkat Hunian Hotel terhadap PAD Sektor Pariwisata

Pengaruh Tingkat Hunian Hotel Terhadap PAD Sektor pariwisata. Terdapat hubungan yang positif antara Tingkat Hunian Hotel dengan PAD Sektor Pariwisata. Tingkat hunian hotel adalah salah satu tolak ukur keberhasilan suatu hotel dalam menjual produknya, yaitu kamar. Yoeti dalam Austriana mengungkapkan bahwa, “Semakin banyak wisatawan yang menyewa kamar hotel maka semakin banyak pula pendapatan yang diperoleh untuk tingkat hunian hotel tersebut.” Jadi dapat diasumsikan bahwa, jika suatu hotel memiliki banyak jumlah kamar yang terjual, maka akan menaikkan jumlah tingkat hunian hotel tersebut, maka secara langsung akan meningkatkan pendapatan hotel yang pada akhirnya akan menaikkan pendapatan daerah melalui pajak hotel yang diterima.

5. Pengaruh PDRB terhadap PAD Sektor Pariwisata

Pengaruh PDRB Terhadap PAD Sektor pariwisata. Terdapat hubungan yang positif antara PDRB dengan PAD Sektor Pariwisata. Salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah terciptanya kemandirian daerah. Hal ini dapat dilihat melalui peningkatan PAD menunjukkan adanya partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintah daerah. Semakin tinggi PAD sektor pariwisata maka dapat menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang salah

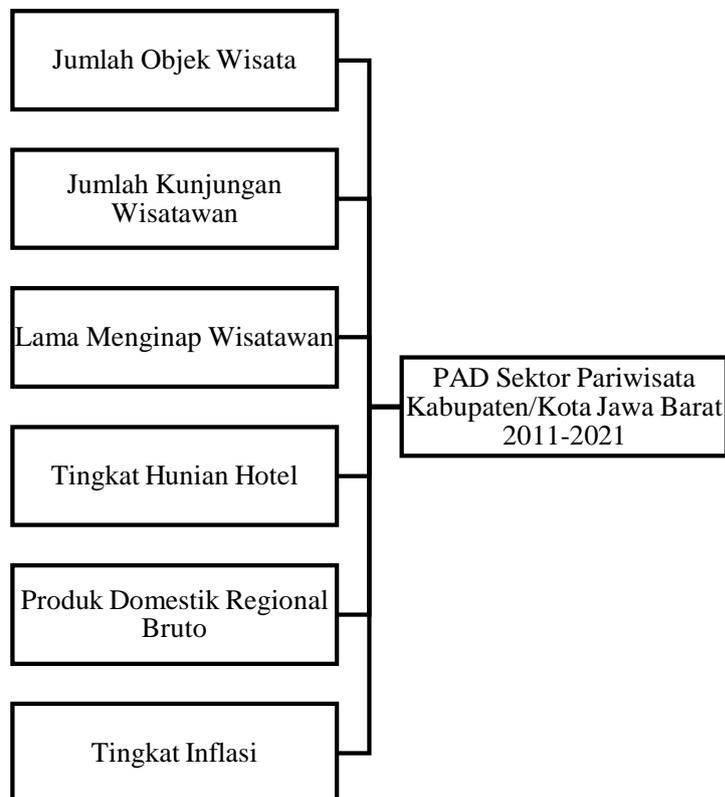
satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRBnya dari tahun ke tahun.

PDRB merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi PAD sektor pariwisata. Semakin tinggi PDRB secara langsung pajak daerah mengalami peningkatan, sehingga penerimaan PAD sektor pariwisata juga mengalami peningkatan (Prasedyawat, 2013:57). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PDRB berhubungan positif dengan PAD.

6. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap PAD Sektor Pariwisata

Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap PAD Sektor pariwisata. Menurut Mankiw (2006:87-88) dalam jurnal ilmiah iwan siswanto inflasi dapat mempengaruhi pendapatan pemerintah daerah serta pengeluaran pemerintah daerah, mankiw mengutarakan bahwa, Seluruh Pemerintah pusat ataupun daerah mengeluarkan uang. Sebagian dari pengeluaran ini yaitu untuk membeli barang dan jasa (untuk pekerja pemerintah, kepentingan publik), dan sebagian untuk menyediakan pembayaran transfer (untuk orang miskin dan kaum lansia). Maka hubungan adanya inflasi yang tinggi akan menyebabkan kendala yang besar terhadap perolehan pendapatan daerah, selain itu akan mempengaruhi tingkat produktivitas perekonomian di dalam masyarakat, akan tetapi inflasi yang rendah akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan PAD.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pandangan atau dugaan sementara, dimana dugaan ini masih harus diuji kembali. Berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

H_0 : Jumlah Objek Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Rata-rata Lama Menginap Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, PDRB, dan Tingkat Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada 10 Kabupaten/Kota Dengan PAD Pariwisata Terbesar di Jawa Barat.

H_1 : Jumlah Objek Wisata, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Rata-rata Lama Menginap Wisatawan, Tingkat Hunian Hotel, PDRB, dan Tingkat Inflasi

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata pada 10 Kabupaten/Kota Dengan PAD Pariwisata Terbesar di Jawa Barat.